

Judul : Pasien BPJS dicibir nakes, legislator: evaluasi layanan kesehatan
Tanggal : Minggu, 09 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pasien BPJS Dicibir Nakes Legislator: Evaluasi Layanan Kesehatan

FOTO: DPR GO ID



Nurhadi

SENAYAN menyayangkan komentar tak berempati dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan (nakes) terhadap pasien BPJS Kesehatan. Persoalan tersebut bukan hanya menyangkut etika profesi, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional.

Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengatakan, nakes merupakan profesi kemanusiaan sehingga ucapan maupun perilaku yang terkesan merendahkan penderitaan pasien tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. "Terlepas bagaimana kronologi medisnya, setiap pasien berhak diperlakukan dengan hormat, bermartabat, dan penuh empati," tegas Nurhadi di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Sebelumnya, seorang pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Chaerawan mencurahkan pengalamannya menunggu ruang perawatan hingga delapan jam di salah satu rumah sakit. Keluhan tersebut justru dibalas dengan cibiran negatif oleh sejumlah akun yang diidentifikasi sebagai nakes. Beberapa hari berselang, tepatnya pada 31 Juli 2026, Yurizal dikabarkan meninggal dunia, sehingga memicu kemarahan publik atas respons tidak beretika dari para nakes tersebut.

Nurhadi berharap, peristiwa tersebut menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor kesehatan. Pelayanan kesehatan tidak hanya diukur dari kecanggihan alat dan kompetensi medis, tetapi juga dari sikap empati, etika, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Ia menilai, kasus tersebut perlu diusut secara objektif, termasuk dugaan pelanggaran etik oleh oknum nakes serta evaluasi terhadap sistem pelayanan rumah sakit. Apabila benar terjadi keterlambatan penanganan karena keterbatasan ruang rawat inap, publik berhak mengetahui penyebab sebenarnya. "Apakah yang terjadi murni persoalan kapasitas layanan, tata kelola rumah sakit, atau terdapat unsur kelalaian yang harus dipertanggungjawabkan," tegas politisi Nasdem ini.

Nurhadi mengingatkan, peserta BPJS Kesehatan memiliki hak pelayanan yang sama dengan pasien lainnya karena telah dijamin dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "BPJS bukan pasien kelas dua. Tidak boleh ada stigma, diskriminasi, ataupun perlakuan berbeda hanya karena status pembiayaannya," tegas legislator asal Jawa Timur (Jatim) ini.

Ia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes), organisasi profesi, institusi pendidikan tenaga kesehatan, hingga seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memperkuat pembinaan etika profesi, termasuk etika bermedia sosial (medsos). Karena di era digital setiap pernyataan nakes di ruang publik dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi medis. "Profesionalisme tercermin tidak hanya di ruang praktik, tetapi juga dalam setiap interaksi di ruang digital," tandasnya. ■ TIF